

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari penelitian di lapangan, ditemukan penyebab timbulnya protes dari warga Nagari Batipuah Ateh. *Pertama*, Pemerintah Nagari tidak berkoordinasi dengan warga pemilik tanah. *Kedua*, permintaan uang *silih jariah* untuk tanaman diatas tanah ulayat. *Ketiga*, berubahnya jalan nagari ke jalan kabupaten. *Keempat*, tuntutan ganti rugi lahan pembangunan jalan. *Kelima*, pemilik tanah tidak mendapatkan pemberitahuan pembangunan jalan. *Keenam*, rusaknya saluran irigasi sawah warga.

Dalam konflik pembangunan jalan Balai Mato Aie-Balai Gamba sudah ada upaya yang dilakukan para pihak dalam penyelesaian konflik. Namun, upaya-upaya yang dilakukan tidak bisa menyelesaikan konflik antara warga dengan Dinas PU. Keterlibatan pihak lain dalam penyelesaian konflik tidak juga bisa melahirkan kesepakatan dan kompromi antar pihak. Meskipun sudah ada peran pihak ketiga dalam menengahi masalah terjadi. Tetapi, hal tersebut belum membuat antar pihak bisa berdamai.

Dalam resolusi konflik pembangunan jalan Balai Gamba-Balai Mato Aie antara warga Nagari Batipuah Ateh dengan Dinas PU sudah ada pihak ketiga. Pihak ketiga yang paling berperan dalam penyelesaian konflik ini adalah DPRD Kabupaten Tanah Datar. DPRD Kabupaten Tanah Datar bertindak sebagai mediator yang sudah melakukan 3 kali pertemuan untuk menyelesaikan konflik

pembangunan jalan Balai Gamba-Balai Mato Aie ini. Akan tetapi pertemuan tersebut belum berhasil mencapai kesepakatan antara para pihak.

Adapun upaya-upaya resolusi konflik yang telah ditempuh masing-masing pihak tidak dapat menyelesaikan pertentangan antar keduanya. Penyebab tidak berhasilnya resolusi konflik tersebut dikarenakan: kedua belah pihak tidak berhasil membuat kesepakatan, DPRD Kabupaten Tanah Datar sebagai mediator mengalami kesulitan dalam menurunkan aspirasi pihak yang kuat, tidak adanya kompensasi terhadap pihak yang kalah dan sulitnya menghilangkan dasar konflik dari tindakan warga Nagari Batipuah Ateh dengan Dinas Pekerjaan Umum. Jadi, dapat dipahami bahwa menurut Simmel berhasilnya resolusi konflik apabila hilangnya dasar konflik, salah satu pihak kehilangan kekuasaan untuk terus berjuang, adanya hadiah “hiburan”, dan peran pihak ketiga. Tidak tercapainya keberhasilan dalam penyelesaian konflik tersebut menyebabkan gagalnya upaya-upaya yang dilakukan pihak-pihak untuk mengatasi konflik.

4.2. Saran

Setelah melihat permasalahan yang terjadi di lapangan, konflik pembangunan jalan kabupaten antara Warga Nagari Batipuah Ateh dengan Dinas Pekerjaan Umum tidak akan berkepanjangan jika permasalahan tersebut segera diselesaikan. Untuk itu peneliti menyarankan :

1. Perlunya koordinasi antara pihak-pihak dalam menyelesaikan konflik pembangunan jalan. Baik itu antara warga, Pemerintah Nagari, KAN, Dinas PU, Pemerintah Kabupaten dan stakeholders terkait. Supaya tidak

adanya pembangunan yang terbengkalai akibat kurangnya koordinasi antar pihak-pihak.

2. Dalam menyelesaikan konflik pembangunan jalan kabupaten kabupaten antara Warga Nagari Batipuah Ateh dengan Dinas Pekerjaan Umum perlu peran pihak ketiga seperti pemerintah atau lembaga sosial yang benar-benar serius untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut.
3. Kepada Pemerintah Daerah (PEMDA) diharapkan untuk dapat menyelesaikan konflik sampai keakarnya (penyebab), supaya konflik tidak muncul lagi dimasa akan datang.

